

PERUMUSAN HASIL RAKOR DITJEN KEBUDAYAAN 2016

Komisi: II (Pelibatan Publik dan Penguatan Kerjasama Pusat dan Daerah dalam Membangun Ekosistem Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman)

Sub Komisi: II A dan B (Pendataan, Kompetensi SDM, Mobilisasi Sumberdaya & Tata Kelola)

PENANGGUNG JAWAB: DIREKTUR PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

FASILITATOR II A: KUAT PRIHATIN

FASILITATOR II B: AHMAD MAHENDRA

PEMBICARA: Drs. Mulyono, M.Pd (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah)

	Permasalahan	Solusi	Rencana Prioritas	Pelibatan Publik	Kesepakatan-kesepakatan
Pendataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data cagar budaya dengan format yang berbeda dan bersifat kaku, kurang lengkap, dan belum sinkron 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat format data baku yang disusun oleh pemerintah pusat 2. Perlu penyederhanaan format data yang mudah dipahami dan mudah diaplikasikan 3. Pengelolaan secara terpadu 4. Membentuk forum komunitas dan jejaring 5. Koordinasi antar instansi terkait 	Pemerintah pusat segera membuat format baku yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah pusat 2. Pemerintah daerah 3. Jejaring dan komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah pusat membuat standardisasi sarana dan prasarana, SOP, dan fasilitas 2. Pemerintah daerah melaksanakan pendataan sesuai dengan SOP 3. LSM, komunitas, dan jejaring membantu proses pendataan

	<p>2. Sarana dan prasarana yang belum memadai</p> <p>3. SDM cagar budaya dan pengelola museum belum optimal</p> <p>4. Belum semua daerah mempunyai komitmen dalam pendataan Cagar Budaya dan pengelolaan Museum.</p>	<p>1. Menyusun standardisasi sarana dan prasarana dalam pendataan</p> <p>2. Penyediaan sarana dan prasarana</p> <p>1. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, bimtek, kursus, dll.</p> <p>2. Membentuk forum komunitas, jejaring.</p> <p>3. Melibatkan mitra museum</p> <p>1. Sosialisasi Undang-Undang Cagar Budaya di berbagai daerah</p> <p>2. Penguatan payung hukum</p> <p>3. Pemberian reward kepada daerah yang mengelola data cagar budaya terbaik</p>	<p>Pengadaan alat yang sesuai dengan standar di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Bimtek, Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi SDM bidang cagar budaya dan museum</p> <p>Pemerintah pusat melakukan sosialisasi UU Cagar Budaya dan penguatan payung hukum ke seluruh wilayah di Indonesia.</p>	<p>1. Pemerintah pusat</p> <p>2. Pemerintah daerah</p> <p>1. Pemerintah pusat</p> <p>2. Pemerintah daerah</p> <p>3. Jejaring</p> <p>4. Komunitas</p> <p>5. Mitra museum</p> <p>6. Organisasi profesi</p> <p>1. Pemerintah pusat</p> <p>2. Pemerintah daerah</p>	
--	--	--	---	---	--

	Permasalahan	Solusi	Rencana Prioritas	Pelibatan Publik	Kesepakatan-kesepakatan
Kompetensi & Sertifikasi Bidang Kebudayaan	<p>1. Kurangnya kompetensi bidang cagar budaya dan permuseuman</p> <p>2. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai</p> <p>3. Seringnya rotasi pegawai</p>	<p>1. Peningkatan kompetensi untuk tenaga pendaftar, tenaga kurator, konservator, educator, preparator</p> <p>2. Sertifikasi untuk tenaga ahli</p> <p>3. Menyediakan sarana konsultasi</p> <p>Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Perlu adanya SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Mendikbud</p>	<p>1. Penyelenggaraan bimtek/in house training bidang tenaga pendaftar, tenaga kurator, konservator, educator, preparator</p> <p>2. Menyediakan sarana konsultasi</p> <p>Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Perlu adanya SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Mendikbud</p>	<p>Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, akademisi, komunitas, tenaga ahli, asosiasi profesi</p> <p>Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, akademisi, komunitas, tenaga ahli, asosiasi profesi</p> <p>Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, akademisi, komunitas, tenaga ahli, asosiasi profesi</p>	<p>1. Pemerintah pusat memberikan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi</p> <p>2. Pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM</p> <p>3. Tenaga ahli dan asosiasi profesi menyediakan narasumber</p>

	Identifikasi Masalah	Gagasan Solutif	Rencana Prioritas	Para Pihak terlibat	Kesepakatan-kesepakatan
Mobilisasi Sumberdaya	<p>1. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal</p> <p>2. Sinergitas antara pusat, daerah, dan stakeholder belum maksimal</p> <p>3. Pendanaan</p>	<p>1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Surat Edaran tentang pemanfaatan sarana dan prasarana</p> <p>3. Peningkatan pengadaan koleksi museum</p> <p>4. Mengikuti pameran keliling museum</p> <p>1. Koordinasi ditingkatkan/ diintensifkan</p> <p>2. Sinergi kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p> <p>1. Kebijakan anggaran</p> <p>2. Peningkatan peran CSR dan masyarakat</p> <p>3. Pemberian fasilitas kepada pamong budaya dan komunitas</p>	<p>1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Surat Edaran tentang pemanfaatan sarana dan prasarana</p> <p>1. Koordinasi ditingkatkan/ diintensifkan</p> <p>2. Peningkatan peran stakeholder</p> <p>Kebijakan anggaran</p> <p>Peningkatan peran CSR dan masyarakat</p> <p>Memberikan fasilitas kepada pamong budaya dan komunitas</p>	<p>Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat</p> <p>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Stakeholder (Swasta, Komunitas, Akademisi)</p> <p>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat, BUMN, Swasta</p> <p>Pemerintah pusat, Pemerintah daerah</p>	<p>1. Pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi</p> <p>2. Pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana</p> <p>3. Masyarakat dan komunitas turut terlibat dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana</p> <p>4. Masyarakat, BUMN, beserta perusahaan swasta mengoptimalkan CSR</p>

	Identifikasi Masalah	Gagasan Solutif	Rencana Prioritas	Para Pihak terlibat	Kesepakatan-kesepakatan
Pemantapan Tata Kelola	1. Sulitnya akses dalam pelestarian cagar budaya di lingkungan militer (TNI/POLRI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi antar lembaga/instansi 2. Sosialisasi Cagar Budaya 3. Pembuatan MoU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi antar lembaga 2. Pembuatan MoU 	Kemenhan, TNI, POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. TNI dan POLRI memberikan kemudahan akses 2. Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah memberikan fasilitasi
	2. Pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya belum konsisten dan maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi UU kepada seluruh stake holder 2. Penerapan punishment bagi pelanggar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi UU kepada seluruh stake holder 2. Penerapan punishment bagi pelanggar 	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah pusat memberikan fasilitasi sosialisasi UU 2. Pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi 3. Masyarakat dan komunitas berperan aktif mengikuti sosialisasi
	3. Penetapan Cagar Budaya belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemda dan stakeholder 2. Pembentukan tim ahli cagar budaya daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemda dan stakeholder 2. Pembentukan tim ahli cagar budaya daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemda dan stakeholder 2. Pembentukan tim ahli cagar budaya daerah 	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tim ahli cagar budaya, stakeholder

	<p>4. Pengelolaan museum kurang maksimal dan belum memenuhi standar</p> <p>5. Promosi dan publikasi museum yang belum optimal</p> <p>6. Pelibatan publik dan masyarakat yang rendah</p>	<p>1. Peningkatan pelaksanaan standardisasi museum (SDM, sarpras, dan biaya)</p> <p>2. Pemberdayaan Tenaga ahli dan kurator</p> <p>3. Peningkatan mutu pengemasan koleksi</p> <p>1. Peningkatan promosi</p> <p>2. Memasukkan materi museum ke kurikulum pendidikan</p> <p>1. Koordinasi dan sosialisasi pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan/ diintensifkan</p> <p>2. Meningkatkan peran stakeholder</p> <p>3. Penerapan IT untuk semua kebijakan dan program</p>	<p>1. Pelaksanaan standardisasi museum (SDM, sarpras, dan biaya)</p> <p>1. Perbaikan materi promosi dan perluasan media</p> <p>2. Memasukkan materi museum ke kurikulum pendidikan</p> <p>1. Koordinasi dan sosialisasi pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan/ diintensifkan</p> <p>2. Meningkatkan peran stakeholder</p> <p>3. Penerapan IT untuk semua kebijakan dan program</p>	<p>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kurator, stakeholder, masyarakat</p> <p>Pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder</p> <p>Pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder, masyarakat</p>	<p>dan mengusulkan penetapan</p> <p>1. Pemerintah pusat menyusun dan menetapkan standardisasi</p> <p>2. Pemerintah daerah beserta masyarakat dan komunitas melaksanakan standardisasi pengelolaan museum</p>
--	---	---	---	--	--